

ABSTRAK

Faktor utama penyebab truk kelebihan muatan adalah masalah ekonomi, misalnya pemilik barang atau pemilik truk berusaha meminimalkan biaya transportasi dengan mengangkut muatan berlebih. Di sisi lain, penegakan hukum belum optimal. Pembatasan muatan truk melalui jembatan timbang gagal mencegahnya. Tanpa intervensi lebih lanjut dari pemerintah, penggunaan truk dengan muatan berlebih secara terus menerus menyebabkan masalah serius pada kebijakan preservasi dan perencanaan perkerasan jalan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia terkait dengan truk yang kelebihan muatan fokus pada analisis faktor kerusakan kendaraan dan sisa masa pakai. Sementara penelitian lain menganalisis kerugian akibat truk kelebihan muatan. Berdasarkan data stasiun timbang Dinas Perhubungan Kota Kediri dan total berat kotor kendaraan. Makalah ini selanjutnya melibatkan analisis beban gandar berdasarkan survei berat dalam gerakan. Dengan menggunakan analisis tersebut, data lalu lintas dapat mewakili beban aktual dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Kediri dilakukan dengan optimal oleh jajaran yang berwenang. Beberapa instansi yang berwenang tersebut antara lain Dinas Perhubungan Kota Kediri dan Satpol PP. Utamanya Dinas Perhubungan Kota Kediri telah banyak menjalankan kegiatan penertiban di beberapa wilayah yang memiliki peluang besar sebagai jalur pengiriman logistik oleh kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar. Kendaraan-kendaraan yang telah melanggar peraturan dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut akan mendapatkan teguran sesuai dengan implementasi kebijakan publik yang ditetapkan. Pasal 307 sendiri mengatur tentang lamanya penjara kurungan sekaligus besaran denda yang harus diperoleh pengemudi yang telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri tentang UULAJ. Disini pengawasan yang dilakukan dengan terus memaksimalkan Razia atau penertiban di beberapa ruas jalan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga bekerjasama dengan Satpol PP Kota Kediri untuk meminimalisir jika terjadi pelanggaran di jalan raya. Penyitaan SIM sekaligus surat izin beroperasi bagi beberapa kendaraan yang melanggar juga diberikan untuk memberikan efek jera. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk meningkatkan uji kelayakan di beberapa UPPKB. Kondisi ini untuk menghindari adanya pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga regulasi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika uji KIR berlangsung, maka beberapa kendaraan harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi kendaraan dan lamanya servis yang dilakukan.

Kata Kunci : UULAJ, *Over Dimension Over Loading*, Sarana Transportasi.

ABSTRACT

The main factor that causes trucks to be overloaded is an economic problem, for example, the owner of goods or the owner of the truck tries to minimize transportation costs by carrying excess loads. On the other hand, law enforcement is not yet optimal. Limiting the loading of trucks through the weighbridge failed to prevent this. Without further intervention from the government, the continuous use of overloaded trucks causes serious problems in the preservation and planning policies of road pavements in Indonesia. Several previous studies in Indonesia related to overloaded trucks focused on analyzing vehicle damage factors and remaining service life. While other studies analyze losses due to overloaded trucks. Based on data from the Kediri City Transportation Service weighing station and the total gross weight of the vehicle. This paper further involves an axle load analysis based on a weight in motion survey. By using this analysis, traffic data can represent the actual load and can provide better results compared to previous studies. The research method used is quantitative method with data collection methods using questionnaires. The results of this study are that the implementation of Law Number 22 of 2009 in the City of Kediri is carried out optimally by the authorities. Some of these authorized agencies include the Kediri City Transportation Service and Satpol PP. In particular, the Kediri City Transportation Service has carried out many control activities in several areas that have great opportunities as logistics delivery routes for vehicles with large loads. Vehicles that have violated the regulations of Law Number 22 of 2009 will receive a warning in accordance with the implementation of established public policies. Article 307 itself regulates the length of confinement as well as the amount of fines that must be obtained by drivers who have violated regulations made by the Kediri City Transportation Agency regarding UULAJ. Here supervision is carried out by continuing to maximize raids or control on several roads. Furthermore, the Kediri City Transportation Service is also working with the Kediri City Satpol PP to minimize violations on the highway. The confiscation of driver's licenses as well as operating licenses for several violating vehicles was also given to provide a deterrent effect. Apart from that, the Kediri City Transportation Service is also improving facilities and infrastructure aimed at improving due diligence in several UPPKBs. This condition is to avoid extortion committed by certain persons so that the regulations carried out must be in accordance with the conditions in the field. When the KIR test takes place, several vehicles must provide a clear explanation regarding the condition of the vehicle and the duration of the service being carried out.

Keywords: UULAJ, Over Dimension Over Loading, Means of Transportation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pasal 307 Undang-Undang No.22 Tahun 2009.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Angkutan Truk ODOL	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Dan Proses Sanksi Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Pembatasan Muatan Truk ODOL.....	38
B. Pengawasan, Upaya Pengendalian ODOL Serta Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menegakkan Hukum Yang Efektif Berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN